



# **PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2021**

**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

## DAFTAR ISI

<b>Judul</b>	<b>Uraian</b>	<b>Hal.</b>
DAFTAR ISI .....		i
DAFTAR TABEL .....		ii
BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	1.1 Latar Belakang .....	1
	1.2 Dasar Hukum .....	2
	1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
	1.4 Sistematika Penulisan .....	4
BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II.....	6
	2.2 Permasalahan dan Penyelesaian Masalah dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 .....	16
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....	20
	3.1 Tujuan dan Sasaran .....	20
	3.2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2021	21
	3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021 .....	29
BAB IV	PENUTUP .....	24
	4.1 Kaidah – kaidah pelaksanaan .....	60
	4.2 Rencana tindak lanjut .....	61

## DAFTAR TABEL

Judul	Uraian	Hal.
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan RENJA dan Pencapaian RENSTRA Biro Administrasi Pembangunan s/d Tahun 2020 ( <i>Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2019 – Berdasarkan Renstra 2014 – 2019</i> ).....	7
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan RENJA dan Pencapaian RENSTRA Biro Administrasi Pembangunan s/d Tahun 2020 ( <i>Berdasarkan Renstra 2019 – 2024</i> ).....	11
Tabel 2.3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan RENJA dan Pencapaian RENSTRA Biro Administrasi Pembangunan s/d Triwulan II Tahun 2021 ( <i>Berdasarkan Perubahan Renstra 2019 – 2024</i> ).....	13
Tabel 3.1	Tujuan dan sasaran .....	22
Tabel 3.2	Pemetaan program kegiatan dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Permndagri 90 Tahun 2019	23
Tabel 3.3	Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2021.....	31
Tabel 3.4	Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Provinsi Jawa Timur pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.....	42

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya operasional

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengacu pada Surat Edaran tentang pedoman penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah serta didasarkan pada Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi samapai dengan Triwlan II Tahun berkenaan dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah

digunakan sebagai dasar penyusunan perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tahun 2021 dan masih berlangsungnya Pandemi Covid-19 di Indonesia khususnya Jawa Timur berdampak penyesuaian-penyesuaian pada pagu anggaran dan capaian kinerja program kegiatan serta sub kegiatan di tahun 2021.

## **1.2 Dasar Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Renja Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaranabn Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Tahun 2008 Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
16. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2020 Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Tahun Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021
19. Perubahan Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

a. Maksud

Penyusunan Perubahan Renja-PD dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar pelaksanaan program dan kegiatan dalam sisa tahun berjalan yang berpedoman hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun berjalan serta dapat menjadi dasar penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, orioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan.

c. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja Perubahan adalah :

- 1) Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- 2) Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah;
- 3) Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat : Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, dan

Sistematika Penulisan.

**BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021**

Memuat : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

**BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

**BAB IV PENUTUP**



## BAB II

### EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja samapi dengan Triwulan II

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui :

1. Faktor-faktor yang timbul tidak tercapainya atau melebihi target kinerja program / kegiatan
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja samapi dengan Triwulan I tidak tercapai kinerja program, implikasi yang timbul serta tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil, hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2021 dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021

Hasil Evaluasi Renja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 adalah sebagaimana tabel berikut :





No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2019 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)		Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2019												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang dievaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I			II			III			IV				12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12			15=14/5x100%	
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
5	3 03 30	Program Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Persentase Pengendalian administrasi pembangunan sesuai ketentuan	100	24.477.256.699	100	19.582.560.824	100	4.894.695.875	100	915.452.218	100	579.633.600	-	1.142.068.966	-	2.132.782.006	100	4.769.936.790	100,00	97,45	100	24.352.497.614	100,00	99,49	Bagian Adm. Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Bina Konstruksi					
	3 03 30 001	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (APBD)	Jumlah PD yang melakukan rekonsiliasi APBD	436	18.222.743.020	340	17.336.648.020	96	886.095.000	93	121.388.288	93	91.511.950	93	321.903.535	-	327.940.624	93	862.744.397	96,88	97,36	433	18.199.392.417	99,31	99,87						
	3 03 30 002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi (APBN)	Jumlah PD yang melakukan rekonsiliasi APBN	140	4.439.365.104	112	1.494.320.104	28	2.945.045.000	28	597.244.520	28	352.104.350	28	469.013.231	-	1.458.084.212	28	2.876.446.313	100,00	97,67	140	4.370.766.417	100,00	98,45						
	3 03 30 003	Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan Pembangunan	Jumlah dokumen evaluasi kebijakan pembangunan	4	1.815.148.575	2	751.592.700	2	1.063.555.875	1	196.819.410	1	136.017.300	1	351.152.200	-	346.757.170	2	1.030.746.080	100,00	96,92	4	1.782.338.780	100,00	98,19						
Rata-Rata Capaian Kinerja																			100	97,29			100	98,32							
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
6.	3 03 31	Program Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan	Persentase Kebijakan pembangunan yang tersusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100	45.019.658.463	100	29.408.933.463	100	15.610.725.000	-	2.388.687.497	-	3.794.510.540	-	3.198.932.925	100	5.741.086.285	100	15.123.217.247	100,00	96,88	100,00	44.532.150.710	100,00	98,92	Bagian Administrasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Bidang Kebinarmargaan, Perhubungan & LPSE					
	3 03 31 001	Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah notulen numusan kebijakan LPSE.	14	4.475.300.945	10	3.412.200.945	4	1.063.100.000	2	195.133.056	1	319.482.135	1	231.061.605	-	300.941.854	4	1.046.618.650	100,0	98,45	14,0	4.458.819.595	100	99,63						
			Jumlah paket lelang yang dilelang melalui LPSE	8.000		6.700		1.300		218		196		234		-	648		49,85		7,348		91,85								
	3 03 31 002	Pengendalian dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa, Rencana Umum Pengadaan Jasa Konstruksi	Jumlah laporan pengendalian terhadap pengadaan barang / jasa	6	3.022.803.000	4	2.565.303.000	2	457.500.000		53.423.188	1	91.475.920	1	196.963.128	-	107.239.424	2	449.101.660	100	98,16	6	3.014.404.660	100	99,72						
	3 03 31 003	Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Program Strategis	Jumlah dokumen pelaporan program strategis	6	4.479.723.420	4	2.339.398.420	2	2.140.325.000	1	386.711.104	-	447.497.292	-	417.961.186	1	814.785.585	2	2.066.955.167	100	96,57	6	4.406.353.587	100	98,36						
	3 03 31 004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Publik	Jumlah sarana dan prasarana yang dibeli	297	21.539.231.098	294	21.092.031.098	3	447.200.000	1	57.475.000	1	40.565.251	-	-	1	343.222.000	3	441.262.251	100	98,67	297	21.533.293.349	100	99,97						
	3 03 31 005	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket pengadaan yang selesai proses	900	7.645.710.000	-	-	900	7.645.710.000	237	1.392.397.131	139	1.795.486.353	203	1.791.896.214	321	2.439.752.439	900	7.419.532.137	100	97,04	900	7.419.532.137	100	97,04	Bagian Pengadaan Barang/Jasa (bergabung dengan Biro Adm. Pembangunan Tahun 2019)					
	3 03 31 006	Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah peserta Bimtek dan ujian yang lulus	35	2.282.640.000	-	-	35	2.282.640.000	-	161.011.880	31	762.946.367	-	207.349.250	-	1.075.214.917	31	2.206.522.414	88,57	96,67	31	2.206.522.414	88,57	96,67						
	3 03 31 007	Advokasi Pengadaan Barang / Jasa	Jumlah advokasi PBJ	8	1.574.250.000	-	-	8	1.574.250.000	1	142.536.138	2	337.057.222	1	353.701.542	4	659.930.066	8	1.493.224.968	100	94,85	8	1.493.224.968	100	94,85						
Rata-Rata Capaian Kinerja																			91,20	96,99			97,20	97,77							
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2019 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2019								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang dievaluasi 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	
7.	3	03	84		100	13.441.488.997	100	11.018.700.497	100	2.422.788.500,00	-	135.112.415	-	395.671.407	100	599.841.731	32	767.164.022	100	2.145.627.075	100	88,56	100	13.164.327.572	100	97,94	Bagian Penyusunan Kebijakan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan
	3	03	84	001	400	4.658.453.316	230	3.992.622.316	170	665.831.000,00	-	98.899.865	50	178.950.000	50	101.767.600	70	68.887.500	170	448.504.965	100	67,36	400	4.441.127.281	100	95,33	
	3	03	84	007	5	2.970.700.550	4	2.583.103.550	1	387.597.000,00	-	-	-	22.642.100	-	30.972.590	1	324.631.200	1	378.245.890	100	97,59	5	2.961.349.440	100	99,69	
	3	03	84	011	10	5.812.335.131	8	4.442.974.631	2	1.369.360.500,00	-	36.212.550	1	373.029.307	1	467.101.541	-	442.532.822	2	1.318.876.220	100	96,31	10	5.761.850.851	100	99,13	
Rata-Rata Capaian Kinerja																		100	87,09			100	99,41				
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>										31.441.017.000,00	5.175.068.754	6.438.831.742	6.965.619.929	11.106.012.668	21.722.198.496												
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)</b>																		95,2	93,8			96,2	98,4				
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)</b>																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan dana tepat waktu; terjalannya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik dengan perangkat daerah maupun instansi terkait lainnya																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja : proses administrasi pengadaan barang/jasa mengalami keterlambatan, lelang ulang, gagal lelang; mutasi jabatan; penyesuaian kebijakan baru Pemerintah Pusat																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan; identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya: Perlu nya konsistensi dokumen perencanaan sampai penganggaran																											

**Tabel 2.2**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan RENJA dan**  
**Pencapaian RENSTRA Biro Administrasi Pembangunan s/d Tahun 2020**  
*(Berdasarkan Renstra 2019 – 2024)*

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2024 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)	Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2020								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang dievaluasi 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III			IV		12=8+9+10+11		13=12/7x100%			14=6+12		15=14/5x100%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
Urusan : Fungsi Penunjang Urusan																													
Bidang Urusan : Kesekretariatan Daerah																													
1	xxx	01 008	Program Pelayan Kesekretariatan	1. Nilai evaluasi implementasi SAKIP Biro AP 2. Persentase Indikator Program yang tercapai 3. Persentase realisasi anggaran 4. Indeks Profesionalitas ASN	82,60 100,00 97,00 88,00	9.923.030.033	81 100 96 88	-	82 100 95 88	9.311.391.146	-	1.529.838.296	-	2.271.894.349	-	1.571.198.616	80,79	3.514.331.879	80,79	8.887.263.140	98,17	95,45	80,79	8.887.263.140	97,81	89,56	Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
		1,00	8,00	Penyusunan, pengelolaan Dokumen Perencanaan, administrasi keuangan, ketelastusahaan dan kepegawaian	Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, ketelastusahaan dan kepegawaian	150	9.923.030.033	-	-	30	9.311.391.146	3	1.529.838.296	14	2.271.894.349	4	1.571.198.616	9,00	3.514.331.879	30,0	8.887.263.140	80,08	95,45	30,00	8.887.263.140	20,00	89,56		
																	Rata-Rata Capaian Kinerja		98,17	95,45			20,00	89,56					
																	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Tinggi					
2	3	03 21	Program Penyusunan Kebijakan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan	Jumlah rumusan kebijakan	43	17.498.127.646	-	-	8	2.511.611.000	-	293.627.000	3	323.352.750	3	1.717.396.204	2	1.320.278.823	8	2.334.375.954	100	92,94	8	2.334.375.954	18,60	13,34	Bagian Penyusunan Kebijakan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan		
		3	03 21	001	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Standar Satuan Harga	Jumlah modul pedoman pelaksanaan pembangunan dan standar satuan harga	20	8.514.127.557	-	-	4	1.491.635.657	-	3.703.250	2	258.625.750	1	269.403.511	1	874.665.400	4	1.406.397.911	100	94,29	4	1.406.397.911	20,00	16,52	
		3	03 21	002	Evaluasi dan Pengendalian Realisasi Anggaran	Jumlah modul realisasi anggaran APBD dan APBN	23	8.984.000.090	-	-	4	1.019.975.343	2	289.923.750	-	64.727.000	-	127.713.870	2	445.613.423	4	927.978.043	100	90,98	4	927.978.043	17,39	10,33	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja		100	92,63			19	13,42					
																	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah					

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2024 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2020								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang dievaluasi 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%									
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.					
3	3 03 19	Program Sinkronisasi Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Kara dan Bina Konstruksi	Jumlah rumusan kebijakan	15	14.022.943.921	-	-	3	3.220.191.433	2	461.193.483	1	578.830.553	2	484.164.064	5	1.650.206.508	10	3.174.394.608	333	98,58	10	3.174.394.608	66,67	23	Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah							
				18	4.419.481.757	-	-	2	498.650.000	2	75.676.845	1	44.749.150	-	67.017.835	3	297.142.680	6	484.586.510	300	97,18	6	484.586.510	33,33	10,96								
				13	9.603.462.164	-	-	2	2.114.066.433		304.690.600	-	459.001.500	1	310.664.350	2	1.024.156.740	3	2.098.513.190	150	99,26	3	2.098.513.190	23,08	21,85								
				14	4.845.638.028	-	-	2	607.475.000		80.826.038	-	35.079.903	1	146.481.879	-	328.907.088	1	591.294.908	50	97,34	1	591.294.908	7	12,20								
Rata-Rata Capaian Kinerja																		187	97,93			30	16,91										
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah										
4	3 03 20	Program Sinkronisasi Infrastruktur Proyek strategis Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Kebinarmagaan dan Perhubungan	Jumlah rumusan kebijakan	290	19.218.593.608	-	-	3	7.275.583.658	1	542.403.151	4	775.520.800	2	1.435.472.275	3	4.374.602.043	13	7.127.998.269	433,33	97,97	13	7.127.998.269	4,48	37,09	Bagian Adm. Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Bina Konstruksi							
				25	8.998.397.627	-	-	3	4.060.281.944	-	214.688.875	-	661.173.200	-	653.050.756	3	2.418.957.782	3	3.947.870.613	100,00	97,23	3	3.947.870.613	12,00	43,87								
				20	5.347.550.023	-	-	2	532.373.658	3	76.959.842	1	31.117.100	3	6.124.250	-	395.275.939	7	509.477.131	350,00	95,70	7	509.477.131	35,00	9,53								
				25	4.872.645.957	-	-	3	2.682.928.056		250.754.434	1	88.678.500	2	770.849.269	-	1.560.368.322	3	2.670.650.525	100,00	99,54	3	2.670.650.525	12,00	54,81								
Rata-Rata Capaian Kinerja																		183	97,62			24	36,32										
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										22.318.777.237,00	2.827.061.930,00	3.949.598.452	5.208.231.159	10.859.419.253	21.524.031.971																		
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)</b>																		<b>113,6</b>	<b>95,91</b>			<b>23,0</b>	<b>39,1</b>										
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)</b>																		<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>			<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>										
<p><b>Faktor pendorong keberhasilan kinerja :</b> ketersediaan dana tepat waktu; terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik dengan perangkat daerah maupun instansi terkait lainnya</p> <p><b>Faktor penghambat pencapaian kinerja :</b> Pandemi Covid 19 membuat Biro AP belum dapat melaksanakan kegiatan secara riil</p> <p><b>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:</b> re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan; identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan, pergeseran APBD</p> <p><b>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya:</b> Perluunya konsistensi dokumen perencanaan sampai penganggaran</p>																																	

**Tabel 2.3**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan**  
**sampai dengan Triwulan II Tahun 2021**

No.	Kode	Usuran / Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2024 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)	Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang dievaluasi 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							I		II		III		IV			K	Rp. (%)	K	Rp.	K	Rp. (%)			
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	16									
		Usuran : Fungsi Penunjang Usuran		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (%)	K	Rp.	K	Rp. (%)			
		Bidang Usuran : Kesekretariatan Daerah																						
1	3	4	01	Program Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	1. Nilai evaluasi implementasi SAKIP Biro AP	83	34.386.771.025	80,79	8.611.391.146	82,30	12.740.890.000	-	2.106.521.954	-	2.462.580.397	-	-	-	-	-	-	-	38,33	Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
				2. Persentase Indikator Program yang tercapai	100		100		100						50,00									
				3. Persentase realisasi anggaran	97		95		95															
				4. Indeks Profesionalitas ASN	88		83		88															
4	01	1.01		Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja	36	6.488.645.947	-	-	12	1.537.065.000	-	33.400.000	6	59.511.800									1,43
4	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6	193.516.666	-	-	2	38.160.000	-	-	-	5.871.400			5.871.400	15,39	-	5.871.400	-	3,03	
4	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD	3	83.582.346	-	-	1	7.702.500	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	
4	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA Perubahan	3	83.582.346	-	-	1	7.702.500	-	400.000	-	-			400.000	5,19	-	400.000	-	0,48	
4	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD	3	83.582.346	-	-	1	7.702.500	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	
4	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA Perubahan	3	83.582.346	-	-	1	7.702.500	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	
4	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen capaian kinerja	18	5.937.567.436	-	-	6	1.461.050.000	2	33.000.000	2	53.640.400			86.640.400	66,67	5,93	86.640.400	22,22	1,46	
4	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah rumusan dokumen evaluasi renja	4	83.232.460	-	-	4	7.045.000	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	
4	01	1.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen administrasi keuangan	120	27.166.058.210	-	-	40	7.745.559.500		1.924.546.595	16	1.450.413.840			3.374.960.435	40,00	43,57	3.374.960.435	-	12,42	
4	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	36	26.727.094.832	-	-	12	7.594.973.000	3	1.917.623.595	3	1.422.134.190			3.339.757.785	50,00	43,97	3.339.757.785	16,67	12,50	
4	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah laporan verifikasi penatausahaan keuangan SKPD	36	330.568.292	-	-	12	106.612.500	3	5.981.000	3	22.535.250			28.516.250	50,00	26,75	28.516.250	16,67	8,63	
4	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah laporan akuntansi perangkat daerah	12	104.605.273	-	-	12	13.498.500	3	942.000	3	948.000			1.890.000	50,00	14,00	1.890.000	50,00	1,81	
4	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan SKPD	6	86.119.023	-	-	2	12.628.000	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	
4	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah dokumen laporan tanggapan atas LHP	3	102.665.153	-	-	1	13.915.000	-	-	-	4.796.400			4.796.400	-	34,47	4.796.400	-	4,67	
4	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah dokumen laporan prognosis	1	71.135.136	-	-	1	3.932.500	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	





No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2024 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang dievaluasi 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp. (%)	K	Rp.		K	Rp. (%)				
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16		
4	01		Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen rumusan kebijakan administrasi pembangunan	43	84.876.464.680	28	12.630.418.831	14	15.029.059.000	3	681.747.647	5	5.212.173.190					8	5.893.920.837	57,14	39,22	36	18.524.339.668	83,72	21,83	Bagian Penyusunan Kebijakan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan	
4	01	1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	jumlah dokumen rumusan kebijakan pengendalian	34	16.005.113.680	21	9.456.024.223	11	10.138.942.000	2	391.823.897	4	3.494.107.462					6	3.885.931.359	54,55	38,33	27	13.341.955.582	79,41	83,36		
4	01	1.01	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	jumlah dokumen modul kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	12	12.184.859.036	6	1.406.397.911	4	2.102.400.500	-	78.069.291	1	564.926.020					1	642.995.311	25,00	30,58	7	2.049.393.222	58,33	16,82	
4	01	1.01	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	jumlah dokumen modul kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN	12	12.471.134.036	2	927.978.043	4	2.197.825.500	-	26.710.095	1	343.905.343					1	370.615.438	25,00	16,86	3	1.298.593.481	25,00	10,41	
4	01	1.01	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	jumlah dokumen kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah 1, 2, 3	10	36.349.120.608	11	7.121.648.269	3	5.838.716.000	2	287.044.511	2	2.496.622.645					4	2.783.667.156	133,33	47,68	15	9.905.315.425	150,00	27,25	
4	01	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah dokumen rumusan kebijakan pelaporan pelaksanaan pembangunan	9	23.871.351.000	7	3.174.394.608	3	4.890.117.000	1	289.923.750	1	1.718.065.728					2	2.007.989.478	67	41,06	9	5.182.384.086	100,00	21,71	
4	01	1.02	01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	jumlah dokumen modul analisis capaian kinerja pembangunan daerah	10	10.615.589.564	6	484.586.516	3	1.302.946.676	-	151.766.500	1	643.753.643					1	795.520.143	33	61,06	7	1.280.106.659	70,00	12,06	
4	01	1.02	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen modul pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	10	11.572.895.948	3	2.098.513.190	3	1.539.867.804	-	174.288.033	-	483.096.695					-	657.384.728	-	42,69	3	2.755.897.918	30,00	23,81	
4	01	1.02	03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	jumlah modul perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah	10	11.314.838.096,00	-	591.294.908	3	1.812.393.520	-	47.120.270	1	882.402.120					1	929.522.390	33	51,29	1	1.520.817.298	10,00	13,44	
																				Rata-Rata Capaian Kinerja	61	34,90			83	31,91		
																				Predikat Kinerja	Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										#####	#####	7.674.753.587	-	-	-	10.463.023.188												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																20,3	28,66			29,8	17,5							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan dana tepat waktu; terjalannya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik dengan perangkat daerah maupun instansi terkait lainnya																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Pandemi Covid 19 membuat Biro AP belanja untuk rapat, pertemuan, workshop, sosialisasi																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan; identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan, pengeseran APBD																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya: Perlu konsistensi dokumen perencanaan sampai penganggaran																												

Berdasarkan hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 sebagaimana tabel 2.1 diatas, hampir semua kegiatan yang perlu ditingkatkan realisasi kinerjanya dibawah 50 %, yaitu :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** yang terdiri dari Kegiatan:
  - a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Kegiatan Administras Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
  - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. **Program Kebijakan Administrasi Pembangunan**, dengan Kegiatan :
  - a. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
  - b. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

## **2.2 Permasalahan dan Penyelesaian Masalah dalam Pelaksanaan Perangkat Daerah Tahun 2021**

Dengan adanya Pandemi Covid 19 yang masih berlangsung hingga Triwulan II Tahun 2021 membuat tidak tercapainya target Program Kegiatan dikarenakan aktivitas koordinasi baik dengan Pemerintah Pusat, Lembaga terkait dan Pemerintah kabupaten Kota sedikit berkurang. Pembatasan kegiatan yang dilaksanakan juga tidak se-leluasa sebelum adanya Pandemi Covid-19. Dengan perlambatan realisasi tidak diikuti dengan perlambatan realisasi output kinerja Program dan Kegiatan. Berikut Permasalahan dan Penyelesaian Masalah spesifik sesuai dengan Bidang Kejadiannya :

1. **Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD**, menghadapi hambatan sebagai berikut :
  - a) Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di beberapa

Perangkat Daerah mengakibatkan tidak tepat waktu Perangkat Daerah tersebut melaporkan realisasinya kepada Biro Administrasi Pembangunan

- b) *Entry* realisasi APBD masih bersifat manual belum ada fitur export import data yang memudahkan Perangkat Daerah dalam melaporkan realisasinya
- c) Masih Kurangnya kesadaran pentingnya penyampaian laporan realisasi tepat waktu kepada Biro Administrasi Pembangunan
- d) ASN yang menjadi pelaksana dalam melaporkan realisasi anggaran belum memadai dari segi kualitas dan kuantitas
- e) Dengan diberlakukan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Standar harga seperti Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisis Standar Belanja (ASB) yang tertera di aplikasi tersebut data pendukung belum terverifikasi dengan lengkap dan benar

Dengan permasalahan-permasalahan tersebut dapat diambil upaya penyelesaiannya sebagai berikut :

- a) Meningkatkan Koordinasi yang lebih intensif dalam percepatan realisasi APBD serta pelaporannya
- b) Mempercepat integrasi data dengan instansi terkait untuk mempermudah Perangkat Daerah meng-*entry* data realisasi
- c) Senantiasa mengingatkan selalu kepada *contact person* yang tergabung pada grup untuk segera melaporkan realisasinya pada aplikasi
- d) Memberikan bimbingan teknis, pendampingan dan pelatihan terkait aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SMEP)
- e) Koordinasi dengan stakeholder untuk penyusunan HSPK dan ASB sesuai dengan ketentuan yang berlaku

**2. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN,** menghadapi hambatan sebagai berikut :

- a) Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di beberapa Perangkat Daerah mengakibatkan tidak tepat waktu Perangkat Daerah tersebut melaporkan realisasi APBN-nya kepada Biro Administrasi Pembangunan
- b) *Entry* realisasi APBN masih bersifat manual belum ada fitur export import data yang memudahkan Perangkat Daerah dalam melaporkan realisasinya
- c) Masih kurangnya kesadaran pentingnya penyampaian laporan realisasi tepat waktu kepada Biro Administrasi Pembangunan
- d) ASN yang menjadi pelaksana dalam melaporkan realisasi anggaran

belum memadai dari segi kualitas dan kuantitas

Dengan permasalahan-permasalahan tersebut dapat diambil upaya penyelesaiannya sebagai berikut :

- f) Meningkatkan Koordinasi yang lebih intensif dalam percepatan realisasi APBN serta pelaporannya
- g) Mempercepat integrasi data dengan instansi terkait untuk mempermudah Perangkat Daerah meng-*entry* data realisasi
- h) Senantiasa mengingatkan selalu kepada *contact person* yang tergabung pada grup untuk segera melaporkan realisasinya pada aplikasi
- i) Memberikan bimbingan teknis, pendampingan dan pelatihan terkait aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SMEP)

**3. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah,** menghadapi masalah yaitu masih banyak Kabupaten / Kota tidak melaporkan progress proyek strategis diantaranya kepada Gubernur. Dengan Permasalahan tersebut inti penyelesaian masalahnya yaitu merumuskan kebijakan pengendalian pelaksanaan pembangunan wilayah sinergi dengan Kabupaten / Kota

**4. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan,** memiliki beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. belum ada pemahaman yang intensif terkait dengan substansi Pedoman Kerja Kepada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur serta melakukan Analisa terhadap standar biaya umum yang dibutuhkan Perangkat daerah tetapi belum terdapat regulasi yang memayungi
- b. belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam rangka menganalisis klusterisasi daerah rawan bencana beserta kewenangannya
- c. Masyarakat masih belum menganggap pentingnya gaya hidup sehat dengan masih tingginya angka BABS.
- d. Proses penyusunan yang masih bersifat konvensional menjadi salah satu faktor dalam menghambat penyusunan Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
- e. Proses administrasi dalam penanganan Darurat Kerusakan Infrastruktur akibat Bencana Alam yang masih bersifat konvensional
- f. Peraturan yang dibentuk tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan Pengelolaan Keuangan Daerah sering tidak sejalan.
- g. Belum optimal pendokumentasian realisasi fisik pembangunan

infrastruktur yang di rekonsiliasikan dengan realisasi keuangan

Permasalahan tersebut diatas dapat dilakukan upaya sebagai berikut :

- a. Melakukan Koordinasi terkait dengan Perangkat Daerah terkait pengampu urusan dalam penyusunan Pedoman Kerja serta melakukan Analisa terhadap kebutuhan substansi Perubahan pada Pedoman kerja
- b. Melakukan kajian analisis daerah rawan bencana
- c. Melakukan advokasi terhadap Kepala Daerah melalui pertemuan-pertemuan dan sosialisasi atau lokakarya terkait pentingnya Hidup Sehat dan perilaku bebas BABS.
- d. Menyusun sistem berbasis teknologi informasi berupa aplikasi e-pedum untuk efektifitas dan efisiensi proses penyusunan Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur
- e. Menyusun sistem berbasis teknologi informasi untuk mendukung kelancaran proses administrasi dalam penanganan Darurat Kerusakan Infrastruktur akibat Bencana Alam
- f. Aturan Pengadaan Barang dan Jasa serta Pengelolaan Keuangan Daerah akan disinkronisasi melalui Peraturan Gubernur tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi data terkait capaian pembangunan infrastruktur yang bersumber dari anggaran APBD maupun APBN

## BAB III

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

#### 3.1 Tujuan dan Sasaran

Renja Biro Administrasi Pembangunan mengacu Rencana Strategis (Renstra) Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2019-2024, dimana dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam Renstra Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Maka visi Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur itu harus diarahkan pada upaya berkesinambungan pembangunan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan sebagai dasar perumusan dan implementasi kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sumberdaya daerah untuk meningkatkan kemakmuran dengan berlandaskan akhlak mulia.

Dengan semangat itu, maka Biro Administrasi Pembangunan untuk kurun waktu 2019-2024 akan mewujudkan tujuan “ **Meningkatkan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan**” dengan Indikator tujuan “**Persentase kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan**”. Sedangkan Sasaran Biro Administrasi Pembangunan “**Meningkatnya kebijakan bidang pembangunan**” dengan indikator Sasaran : **(1) Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang menjadi kebijakan; (2) Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti**

Untuk mewujudkan tujuan Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2019-2024, maka dilaksanakan strategi-strategi sebagai berikut:

1. Menciptakan tata kelola penyusunan kebijakan dan pengendalian administrasi pembangunan berbasis TIK;
2. Membangun sistem administrasi implementasi kebijakan pedoman pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota serta monitoring, evaluasi dan pengendalian APBD dan APBN di tingkat provinsi yang transparan, akuntabel dan berbasis TIK.
3. Membangun sistem pengelolaan administrasi pembangunan bidang Kebinamargaan, Perhubungan, Infrastruktur Proyek Strategis, KPBU, Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan

Permukiman, Cipta Karya dan Jasa Konstruksi yang efektif, transparan dan akuntabel;

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai tahun 2021 yang disesuaikan dengan tupoksi Biro Administrasi Pembangunan dengan kondisi masih berlangsungnya Pandemi Covid 19 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran**

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	
			Renja 2021	Renja P 2021 (dampak Covid 19)
1.	<b>Tujuan :</b> Meningkatkan pengendalian administrasi dan pelaksanaan pembangunan	Persentase kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan	100 %	100 %
2.	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya kebijakan bidang pembangunan	Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang menjadi kebijakan	100 %	100%
		Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100 %	100 %

### **3.2 Pemetaan Program Kegiatan dengan Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019**

Dengan diterapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan nomenklatur eksisting dengan RKPD Tahun 2021. Berikut Tabel Pemetaan Nomenklatur Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021.



**Tabel 3.2**

Pemetaan program kegiatan dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Permndagri 90 Tahun 2019

PROGRAM KEGIATAN LAMA (RKPD 2021)							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
KOD E	URUSAN	BIDAN G URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGE T	SATUA N	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KOD E
			<i>Program Pelayanan Kesekretariatan</i>	<i>Nilai evaluasi implementasi SAKIP Biro Administrasi Pembangunan</i>	82,3	point	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja</b>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1. Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Biro Administrasi Pembangunan 2. Persentase indikator program yang tercapai 3. Persentase realisasi anggaran 4. Indeks Profesional ASN	PENUNJANG	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
			<i>Persentase Indikator Program yang tercapai</i>	100	persen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA								
			<i>Persentase realisasi anggaran</i>	96	persen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan								
			<i>Indeks Profesionalitas ASN</i>	88	persen	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA								
			Penyusunan Pengelolaan Dokumen Perencanaan, Administrasi Keuangan, Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, ketatausahaan dan kepegawaian	30	dok	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA Perubahan							
			<i>Program Penyusunan Kebijakan dan Pengendali</i>	<i>Jumlah rumusan kebijakan</i>	8	dok	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	jumlah dokumen capaian kinerja							

PROGRAM KEGIATAN LAMA (RKPD 2021)							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE
			<i>an Administrasi Pembangunan</i>				Kinerja SKPD								
			Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Standar Satuan Harga	jumlah modul pedoman pelaksanaan pembangunan dan standar satuan harga	4	dok	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi renja							
			Evaluasi dan Pengendalian Realisasi Anggaran	Jumlah modul realisasi anggaran APBD dan APBN	4	dok	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN							
			<b>Program Sinkronisasi Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Bina Konstruksi</b>	<b>Jumlah rumusan kebijakan</b>	3	dok	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah laporan verifikasi penatausahaan	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>jumlah dokumen administrasi keuangan</b>					
			Penyelenggaraan administrasi pembangunan infrastruktur perumahan	Jumlah modul kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan	3	dok	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah laporan akuntansi perangkat daerah							

PROGRAM KEGIATAN LAMA (RKPD 2021)							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE
			rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya	permukiman dan cipta karya											
			Penyelenggaraan administrasi pembangunan infrastruktur sumber daya air	Jumlah modul kebijakan sumber daya air	3	dok	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan SKPD							
			Penyelenggaraan kebijakan jasa konstruksi	Jumlah modul kebijakan jasa konstruksi	3	dok	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah laporan tanggapan atas LHP							
			<b>Program Sinkronisasi Infrastruktur Proyek Strategis, Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU), Kebencanaan dan Perhubungan</b>	<b>Jumlah rumusan kebijakan</b>	3	dok	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan prognosis							
			Penyelenggaraan administrasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan	Jumlah modul kebijakan pembangunan proyek startegis dan Kerjasama	4	dok	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah laporan perencanaan kebutuhan BMD SKPD	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	jumlah laporan BMD					

PROGRAM KEGIATAN LAMA (RKPD 2021)							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
KOD E	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KOD E
			Usaha (KPBU) dan sinergitas proyek strategis	Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU)											
			Penyelenggaraan administrasi pembangunan infrastruktur kebinamargaan	Jumlah modul kebijakan infrastruktur kebinamargaan	3	dok	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	jumlah laporan data pegawai	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah laporan kepegawaian PD					
			penyelenggaraan administrasi pembangunan infrastruktur perhubungan	jumlah modul kebijakan infrastruktur perhubungan	4	dok	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah laporan SKP							
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah laporan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi								
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket pengadaan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah paket pengadaan					
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket pengadaan							
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket pengadaan							

PROGRAM KEGIATAN LAMA (RKPD 2021)							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019									
KOD E	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KOD E	
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan koordinasi		jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah						
							Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah laporan penatausahaan arsip								
							Pengadaan Aset Tetap Lainnya	jumlah aset tetap	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah pengadaan barang milik daerah						
							Pengadaan Aset Tetap Lainnya	jumlah aset tetap	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jasa penunjang urusan						
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	jumlah paket jasa	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah paket pemeliharaan BMD						
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah paket peralatan mesin yang dipelihara									
						Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	jumlah paket aset tak berwujud yang dipelihara									
							Pengendalian Administrasi	jumlah dokumen	Pengendalian	jumlah dokumen	PROGRAM KEBIJAKAN	Jumlah dokumen				

PROGRAM KEGIATAN LAMA (RKPD 2021)							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019											
KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
							Pelaksanaan Pembangunan APBD	modul kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	<b>Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	rumusan kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan	ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	rumusan kebijakan administrasi Pembangunan						
						Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	jumlah dokumen modul kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN											
						Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah modul kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah 1, 2, 3											
							Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	jumlah dokumen modul analisis capaian kinerja pembangunan daerah	<b>Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	jumlah dokumen rumusan kebijakan pelaporan pelaksanaan pembangunan								
						Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen modul pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah											

PROGRAM KEGIATAN LAMA (RKPD 2021)							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019									
KOD E	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KOD E	
							Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	jumlah modul perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah								

### **3.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021, menetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut :



**Tabel 3.3**  
**Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2021**

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kegiatan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target Capaia	(Rp)				Tolok Ukur	Target Capaia	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXX01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Sby	1. 1 Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Biro Administrasi Pembangunan 2. Persentase indikator program yang tercapai 3. Persentase realisasi anggaran 4. Indeks Profesional ASN	1. 82,3 2. 100 3. 96 4. 88	<b>12.740.890.000</b>	XXX01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Sby	1. Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Biro Administrasi Pembangunan 2. Persentase indikator program yang tercapai 3. Persentase realisasi anggaran 4. Indeks Profesional ASN	1. 82,3 2. 100 3. 96 4. 88	<b>12.740.890.000</b>
XXX01101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sby	<i>jumlah dokumen perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja</i>	12	<b>1.537.065.000</b>	XXX01101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sby	<i>jumlah dokumen perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja</i>	12	<b>1.537.065.000</b>

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kegiatan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target Capaia	(Rp)				Tolok Ukur	Target Capaia	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXX011010 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sby	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	38.160.000	XXX011010 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sby	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	38.160.000
XXX011010 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sby	jumlah dokumen RKA	1	7.702.500	XXX011010 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sby	jumlah dokumen RKA	1	7.702.500
XXX011010 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sby	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1	7.702.500	XXX011010 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sby	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1	7.702.500
XXX011010 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sby	Jumlah dokumen DPA	1	7.702.500	XXX011010 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sby	Jumlah dokumen DPA	1	7.702.500
XXX011010 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Sby	jumlah dokumen DPA Perubahan	1	7.702.500	XXX011010 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Sby	jumlah dokumen DPA Perubahan	1	7.702.500
XXX011010 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Sby	jumlah dokumen capaian kinerja	6	1.461.050.000	XXX011010 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Sby	jumlah dokumen capaian kinerja	6	1.461.050.000
XXX011010 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sby	jumlah dokumen evaluasi renja	4	7.045.000	XXX011010 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sby	jumlah dokumen evaluasi renja	4	7.045.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kegiatan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target Capaia	(Rp)				Tolok Ukur	Target Capaia	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXX01102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sby	<i>jumlah dokumen administrasi keuangan</i>	27	7.745.559.500	XXX01102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sby	<i>jumlah dokumen administrasi keuangan</i>	27	7.745.559.500
XXX011020 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	sby	jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	7.594.973.000	XXX011020 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	sby	jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	7.594.973.000
XXX011020 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sby	jumlah laporan verifikasi penatausahaan	12	106.612.500	XXX011020 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sby	jumlah laporan verifikasi penatausahaan	12	106.612.500
XXX011020 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sby	jumlah laporan akuntansi perangkat daerah	12	13.498.500	XXX011020 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sby	jumlah laporan akuntansi perangkat daerah	12	13.498.500
XXX011020 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sby	jumlah laporan keuangan SKPD	2	12.628.000	XXX011020 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sby	jumlah laporan keuangan SKPD	2	12.628.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kegiatan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target Capaia	(Rp)				Tolok Ukur	Target Capaia	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXX011020 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Sby	jumlah laporan tanggapan atas LHP	1	13.915.000	XXX011020 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Sby	jumlah laporan tanggapan atas LHP	1	13.915.000
XXX011020 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sby	jumlah laporan prognosis	1	3.932.500	XXX011020 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sby	jumlah laporan prognosis	1	3.932.500
XXX01103	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Sby	<i>jumlah laporan BMD</i>	<b>4</b>	<b>5.157.500</b>	XXX01103	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Sby	<i>jumlah laporan BMD</i>	<b>4</b>	<b>5.157.500</b>
XXX011030 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sby	jumlah laporan perencanaan kebutuhan BMD SKPD	4	5.907.500	XXX011030 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sby	jumlah laporan perencanaan kebutuhan BMD SKPD	4	5.907.500
XXX01105	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Sby	<i>jumlah laporan kepegawaian PD</i>	<b>25</b>	<b>415.776.000</b>	XXX01105	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Sby	<i>jumlah laporan kepegawaian PD</i>	<b>25</b>	<b>415.776.000</b>

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kegiatan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target Capaia	(Rp)				Tolok Ukur	Target Capaia	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXX011050 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sby	jumlah laporan data pegawai	12	32.724.000	XXX011050 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sby	jumlah laporan data pegawai	12	32.724.000
XXX011050 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sby	jumlah laporan SKP	12	72.480.000	XXX011050 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sby	jumlah laporan SKP	12	72.480.000
XXX011050 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sby	jumlah laporan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarka tugas dan fungsi	1	310.572.000	XXX011050 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sby	jumlah laporan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarka tugas dan fungsi	1	310.572.000
<b>XXX01106</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Sby	1. Jumlah paket pengadaan 2. Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	1. 3 2. 2	<b>2.184.572.000</b>	<b>XXX01106</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Sby	1. Jumlah paket pengadaan 2. Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	1. 3 2. 2	<b>2.184.572.000</b>

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kegiatan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)				Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXX011060 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sby	jumlah paket pengadaan	1	761.000.750	XXX011060 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sby	jumlah paket pengadaan	1	761.000.750
XXX011060 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sby	jumlah paket pengadaan	1	505.480.500	XXX011060 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sby	jumlah paket pengadaan	1	505.480.500
XXX011060 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sby	jumlah paket pengadaan	1	248.330.500	XXX011060 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sby	jumlah paket pengadaan	1	248.330.500
XXX011060 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sby	jumlah laporan koordinasi	1	661.760.250	XXX011060 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sby	jumlah laporan koordinasi	1	661.760.250
XXX011061 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sby	jumlah laporan penatausahaan arsip	1	8.000.000	XXX011061 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sby	jumlah laporan penatausahaan arsip	1	8.000.000
<b>XXX01107</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Sby	<b>jumlah pengadaan barang milik daerah</b>	<b>1</b>	<b>446.650.000</b>	<b>XXX01107</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>	Sby	<b>jumlah pengadaan barang milik daerah</b>	<b>1</b>	<b>446.650.000</b>
XXX011070 7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Sby	jumlah aset tetap	1	446.650.000	XXX011070 7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Sby	jumlah aset tetap	1	446.650.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kegiatan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)				Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXX01108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sby	<i>jumlah jasa penunjang urusan</i>	1	50.000.000	XXX01108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sby	<i>jumlah jasa penunjang urusan</i>	1	50.000.000
XXX0110801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sby	jumlah pengiriman dokumen	1	50.000.000	XXX0110801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sby	jumlah pengiriman dokumen	1	50.000.000
XXX01109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sby	<i>jumlah paket pemeliharaan BMD</i>	34	355.360.000	XXX01109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sby	<i>jumlah paket pemeliharaan BMD</i>	34	355.360.000
XXX0110904	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Sby	jumlah paket jasa	16	113.160.000	XXX0110904	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Sby	jumlah paket jasa	16	113.160.000
XXX0110906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sby	jumlah paket peralatan mesin yang dipelihara	12	42.200.000	XXX0110906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sby	jumlah paket peralatan mesin yang dipelihara	12	42.200.000
XXX0110908	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Sby	jumlah paket aset tak berwujud yang dipelihara	6	200.000.000	XXX0110908	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Sby	jumlah paket aset tak berwujud yang dipelihara	6	200.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kegiatan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)				Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40108	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Jatim	Jumlah dokumen rumusan kebijakan	16	15.029.059.000	40108	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Jatim	Jumlah dokumen rumusan kebijakan	16	15.029.059.000
40108101	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jatim	jumlah dokumen rumusan kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan	11	10.138.942.000	40108101	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jatim	jumlah dokumen rumusan kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan	11	10.138.942.000
4010810101	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jatim	jumlah dokumen modul kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	4	2.102.400.500	4010810101	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jatim	jumlah dokumen modul kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	4	2.102.400.500
4010810102	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jatim	jumlah dokumen modul kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN	4	2.197.825.500	4010810102	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jatim	jumlah dokumen modul kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN	4	2.197.825.500



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kegiatan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target Capaia	(Rp)				Tolok Ukur	Target Capaia	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4010810103	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jatim	Jumlah modul kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah 1, 2, 3	3	5.838.716.000	4010810103	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jatim	Jumlah modul kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah 1, 2, 3	3	5.838.716.000
40108102	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jatim	<i>jumlah dokumen rumusan kebijakan pelaporan pelaksanaan pembangunan</i>	5	<b>4.890.117.000</b>	40108102	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jatim	<i>jumlah dokumen rumusan kebijakan pelaporan pelaksanaan pembangunan</i>	5	<b>4.890.117.000</b>
4010810201	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jatim	jumlah dokumen modul analisis capaian kinerja pembangunan daerah	3	1.302.946.676	4010810201	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jatim	jumlah dokumen modul analisis capaian kinerja pembangunan daerah	3	1.302.946.676
4010810202	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jatim	jumlah dokumen modul pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	2	1.539.867.804	4010810202	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jatim	jumlah dokumen modul pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	2	1.539.867.804

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kegiatan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target Capaia	(Rp)				Tolok Ukur	Target Capaia	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4010810203	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jatim	jumlah modul perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah	3	2.047.302.520	4010810203	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jatim	jumlah modul perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah	3	2.047.302.520

### **3.4 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021**

Berdasarkan hasil review dan Analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikator beserta pada dokumen Perubahan RKPD 2021, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun table perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni Biro Administrasi Pembangunan pada saat sebelum perubahan dilaksanakan dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan.

Rencana Kerja dan Pendanaan Biro Administrasi Pembangunan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, adalah sebagaimana table berikut :

Tabel 3.4

## Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Sebelum Perubahan		Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sumber Dana
		Tolok ukur	Target		Tolok ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXX01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.1 Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Biro Administrasi Pembanguna 2. Persentase indikator program yang tercapai 3. Persentase realisasi anggaran 4. Indeks Profesional ASN	1. 82,3 2. 100 3. 96 4. 88	Sby	1. 1 Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Biro Administrasi Pembanguna 2. Persentase indikator program yang tercapai 3. Persentase realisasi anggaran 4. Indeks Profesional ASN	1. 82,3 2. 100 3. 96 4. 88	Sby	9.906.181 214	12.740.890.00 0	2.834.708.786	APBD
XXX01101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>jumlah dokumen perencanaan anggaran dan evaluasi</i>	12	Sby	<i>jumlah dokumen perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja</i>	12	Sby	130.200.000	1.537.065.000	1.406.865.000	APBD
XXX0110101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	Sby	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	Sby		38.160.000	0	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Sebelum Perubahan		Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sumber Dana
		Tolok ukur	Target		Tolok ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXX011010 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA	1	Sby	jumlah dokumen RKA	1	Sby		7.702.500		APBD
XXX011010 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1	Sby	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1	Sby		7.702.500		APBD
XXX011010 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1	Sby	Jumlah dokumen DPA	1	Sby		7.702.500		APBD
XXX011010 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA Perubahan	1	Sby	jumlah dokumen DPA Perubahan	1	Sby		7.702.500		APBD
XXX011010 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	jumlah dokumen capaian kinerja	6	Sby	jumlah dokumen capaian kinerja	6	Sby		1.461.050.000		APBD
XXX011010 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi renja	4	Sby	jumlah dokumen evaluasi renja	4	Sby		7.045.000		APBD
<b>XXX01102</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>jumlah dokumen administrasi keuangan</b>	<b>27</b>	Sby	<b>jumlah dokumen administrasi keuangan</b>	<b>27</b>	Sby	<b>7.233.380.000</b>	<b>7.745.559.500</b>	<b>512.179.500</b>	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Sebelum Perubahan		Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sumber Dana
		Tolok ukur	Target		Tolok ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXX011020 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	Sby	jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	Sby		7.594.973.000		APBD
XXX011020 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah laporan verifikasi penatausahaan	12	Sby	jumlah laporan verifikasi penatausahaan	12	Sby		106.612.500		APBD
XXX011020 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah laporan akuntansi perangkat daerah	12	Sby	jumlah laporan akuntansi perangkat daerah	12	Sby		13.498.500		APBD
XXX011020 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan SKPD	2	Sby	jumlah laporan keuangan SKPD	2	Sby		12.628.000		APBD
XXX011020 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah laporan tanggapan atas LHP	1	Sby	jumlah laporan tanggapan atas LHP	1	Sby		13.915.000		APBD
XXX011020 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan prognosis	1	Sby	jumlah laporan prognosis	1	Sby		3.932.500		APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Sebelum Perubahan		Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sumber Dana
		Tolok ukur	Target		Tolok ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXX01103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>jumlah laporan BMD</i>	4	Sby	<i>jumlah laporan BMD</i>	4	Sby	4.250.000	5.157.500	907.500	APBD
XXX0110301	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah laporan perencanaan kebutuhan BMD SKPD	4	sby	jumlah laporan perencanaan kebutuhan BMD SKPD	4	sby	4.250.000	5.157.500	907.500	APBD
XXX01105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>jumlah laporan kepegawaian PD</i>	25	sby	<i>jumlah laporan kepegawaian PD</i>	25	sby	433.225.000	415.776.000	17.449.000	APBD
XXX0110504	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	jumlah laporan data pegawai	12	Sby	jumlah laporan data pegawai	12	Sby		32.724.000		APBD
XXX0110505	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah laporan SKP	12	Sby	jumlah laporan SKP	12	Sby		72.480.000		APBD
XXX0110509	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah laporan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarka	1	Sby	jumlah laporan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarka	1	Sby		310.572.000		APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Sebelum Perubahan		Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sumber Dana
		Tolok ukur	Target		Tolok ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXX01106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Jumlah paket pengadaan 2. Jumlah laporan administrasi	1. 3 2. 2	Sby	1. Jumlah paket pengadaan 2. Jumlah laporan	1. 3 2. 2	Sby	1.423.126.214	2.184.572.000	(1.131.102.500)	APBD
XXX011060 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket pengadaan	1	Sby	jumlah paket pengadaan	1	Sby		761.000.750		APBD
XXX011060 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket pengadaan	1	Sby	jumlah paket pengadaan	1	Sby		505.480.500		APBD
XXX011060 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket pengadaan	1	Sby	jumlah paket pengadaan	1	Sby		248.330.500		APBD
XXX011060 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan koordinasi	1	Sby	jumlah laporan koordinasi	1	Sby		661.760.250		APBD
XXX011061 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah laporan penatausahaan arsip	1	Sby	jumlah laporan penatausahaan arsip	1	Sby		8.000.000	0	APBD



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Sebelum Perubahan		Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sumber Dana
		Tolok ukur	Target		Tolok ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXX01107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>jumlah pengadaan barang milik daerah</i>	1	Sby	<i>jumlah pengadaan barang milik daerah</i>	1	Sby	110.000.000	446.650.000	336.650.000	APBD
XXX0110707	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	jumlah paket pengadaan	1	Sby	jumlah paket pengadaan	1	Sby	110.000.000	446.650.000	336.650.000	APBD
XXX01108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>jumlah jasa penunjang urusan</i>	1	Sby	<i>jumlah jasa penunjang urusan</i>	1	Sby	100.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD
XXX0110801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah pengiriman dokumen	1	Sby	jumlah pengiriman dokumen	1	Sby	100.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD
XXX01109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	<i>jumlah paket pemeliharaan BMD</i>	34	Sby	<i>jumlah paket pemeliharaan BMD</i>	34	Sby	472.000.000	355.360.000	27.300.000	APBD
XXX0110904	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak	jumlah paket jasa	16	Sby	jumlah paket jasa	16	Sby		113.160.000		APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Sebelum Perubahan		Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sumber Dana
		Tolok ukur	Target		Tolok ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXX0110906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah paket peralatan mesin yang dipelihara	12	Sby	jumlah paket peralatan mesin yang dipelihara	12	Sby		42.200.000		APBD
XXX0110908	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	jumlah paket aset tak berwujud yang dipelihara	6	Sby	jumlah paket aset tak berwujud yang dipelihara	6	Sby		200.000.000		APBD
40108	<b>PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<i>Jumlah dokumen rumusan kebijakan administrasi</i>	16	Jatim	<i>Jumlah dokumen rumusan kebijakan administrasi</i>	16	Jatim	15.013.174.100	15.029.059.000	15.884.900	APBD
40108101	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	<i>jumlah dokumen rumusan kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan</i>	11	Jatim	<i>jumlah dokumen rumusan kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan</i>	11	Jatim	9.383.233.640	10.138.942.000	755.708.360	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Sebelum Perubahan		Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sumber Dana
		Tolok ukur	Target		Tolok ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401081010 1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	jumlah dokumen modul kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	4	Jatim	jumlah dokumen modul kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	4	Jatim	1.876.646.820	2.102.400.500	225.753.680	APBD
401081010 2	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	jumlah dokumen modul kebijaka pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN	4	Jatim	jumlah dokumen modul kebijaka pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN	4	Jatim	1.876.646.820	2.197.825.500	321.178.680	APBD
401081010 3	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah modul kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah 1, 2, 3	3	Jatim	Jumlah modul kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah 1, 2, 3	3	Jatim	5.629.940.000	5.838.716.000	208.776.000)	APBD
40108102	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	<i>jumlah dokumen rumusan kebijakan pelaporan pelaksanaan pembangunan</i>	5	Jatim	<i>jumlah dokumen rumusan kebijakan pelaporan pelaksanaan pembangunan</i>	5	Jatim	5.629.940.460	4.890.117.000	(739.823.460)	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Sebelum Perubahan		Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sumber Dana
		Tolok ukur	Target		Tolok ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401081020 1	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	jumlah dokumen modul analisis capaian kinerja pembangunan daerah	3	Jatim	jumlah dokumen modul analisis capaian kinerja pembangunan daerah	3	Jatim	1.876.646.820	1.302.946.676	(573.700.144)	APBD
401081020 2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen modul pelaporan pelaksanaan pembangunan	2	Jatim	jumlah dokumen modul pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	2	Jatim	1.876.646.820	1.539.867.804	(336.779.016)	APBD
401081020 3	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	jumlah modul perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah	3	Jatim	jumlah modul perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah	3	Jatim	1.876.646.820	2.047.302.520	170.655.700	APBD

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 dan RKPD Perubahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan visi serta misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.

#### **4.1 Kaidah – kaidah Pelaksanaan**

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh staf Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
  - a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
  - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2021.

## 4.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2021, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Surabaya, 20 September 2021  
Plt. KEPALA BIRO  
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN



**JEMPIN MARBUN, S.H., M.H**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640917 199203 1 005